

HILANGNYA AKSES SUBSIDI PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH ASING DI JEPANG (STUDI KASUS : SEKOLAH KOREA UTARA)

The Disappearance of Education Subsidy Access for Foreign School in Japan (Case Study: North Korean School)

Oleh : Anjani Tri Fatharini, 20110510213

Abstract

Since 2010 the Japanese government has provided High School Enrollment Support Fund. However, the government refuse to give it to North Korean schools. The reason behind this refusal can be explained through the concept of political system and hard power. In political system, interest group called Zaitokukai articulate their interest to not give North Korean School subsidy because they are not qualified. The Japanese government also make this refusal as its hard power. The aim of this article is to find out what is the reason behind Japanese government refusal to give high school support fund for North Korean schools.

Keywords: *The Japanese government, High School Support Fund, North Korean School.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap masyarakat di berbagai negara. Jepang yang merupakan salah satu negara maju di wilayah Asia Timur tentunya memahami betul betapa pentingnya pendidikan bagi warga negaranya. Tingkat pendidikan Negara Jepang sudah tidak dapat diragukan lagi di mana turut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negaranya. Berdasarkan data dari *United Nations Development Programme : Human Development Reports* pada 15 November 2013 menunjukkan bahwa Jepang menempati ranking 17 dari 187 negara berdasarkan index pendidikannya dengan nilai 0,890. (UN 2013)

Demi meningkatkan kualitas pendidikan negaranya, pemerintah Jepang mengalokasikan banyak dana per tahun salah satunya berupa tunjangan biaya pendidikan. Pada 31 Maret 2010, pemerintah Jepang menyusun sebuah program yaitu *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* yang diterapkan pada 1 April 2010. (MEXT 2010) Dalam program ini, tidak hanya sekolah Jepang saja yang dapat menerima bantuan dana pendidikan tetapi juga berbagai sekolah asing yang diakui oleh *Japanese Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology* dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*. (MEXT, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2010)

Sebelum adanya program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund*, sekolah asing yang ada di Jepang telah mendapatkan bantuan dana pendidikan dari pemerintah prefektur, termasuk Sekolah Korea Utara. Sekolah Korea Utara juga turut mengajukan bantuan melalui program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* pada tahun 2010, namun dinyatakan ditolak pada tahun 2013. Beberapa pemerintah daerah juga telah menolak subsidi atau memotong subsidi yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah Korea Utara sampai saat ini. Subsidi telah dihentikan di beberapa prefektur seperti Tokyo, Osaka dan Hiroshima pada Oktober 2014. Pemerintah kota seperti Yokohama juga telah mengikuti keputusan pemerintah prefektur dan menahan pemberian subsidi. Sampai saat ini, terdapat 17 sekolah internasional, 8 sekolah *Brazilian*, dan 2 sekolah *Chinese* yang telah menerima subsidi tersebut. Namun 10 Sekolah Korea Utara dikecualikan dari program bantuan biaya pendidikan tersebut. (Tanaka 2011) Hanya terdapat empat sekolah Korea di Jepang yang berafiliasi dengan Korea Selatan dan mereka diikutsertakan dalam bantuan dana pendidikan oleh pemerintah dalam program tersebut. (Talmadge 2013)

Mengikuti keputusan pemerintah pusat Jepang yang tidak memberi bantuan bagi Sekolah Korea Utara tersebut, beberapa pemerintah daerah juga telah menolak subsidi atau memotong subsidi yang telah diberikan kepada

sekolah-sekolah Korea Utara sampai saat ini. Subsidi telah dihentikan di beberapa prefektur seperti Tokyo, Osaka dan Hiroshima pada Oktober 2014. Beberapa pemerintah kota seperti Yokohama dan Hiroshima juga telah mengikuti keputusan pemerintah prefektur dan menahan pemberian subsidi. (KIM 2014)

Program *Free Tuition Fee at Public High Schools*

Tujuan dari program biaya sekolah gratis bagi sekolah menengah atas negeri ini adalah untuk membangun masyarakat yang di mana setiap siswa dapat berkonsentrasi untuk belajar tanpa harus mengkhawatirkan biaya pendidikan mereka. Pendapatan nasional digunakan untuk membayar biaya di sekolah menengah atas negeri tersebut sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keuangan keluarga siswa. Bantuan biaya ini meliputi biaya sekolah pokok diluar dari biaya pendidikan lain seperti biaya martikulasi, buku pelajaran, dan biaya perjalanan kelas. Siswa ataupun wali murid tidak perlu untuk mengisi formulir tertentu demi untuk mendaftar dalam program ini. (MEXT, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2010) Jadi pada prinsipnya sekolah menengah atas negeri tidak diharuskan untuk memungut biaya sekolah. Pemerintah nasional telah mensubsidi biaya yang dibutuhkan untuk *local public organizations*. *Local public organizations* akan menerima sejumlah uang yang setara dengan kebutuhan biaya sekolah yang seharusnya dari pendapatan nasional.

Program *High School Enrollment Support Fund*

Membantu siswa agar dapat belajar dengan rajin tanpa harus mengkhawatirkan biaya sekolah merupakan tujuan dari program bantuan dana pendidikan bagi sekolah menengah atas ini. Bantuan dana pendidikan ini telah dibuat untuk mengurangi pengeluaran orangtua siswa baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dan lain-lain. Bantuan biaya pendidikan tersebut sebesar 9.900 yen per bulannya (118.800 yen per tahun) bagi setiap siswa dan dapat bertambah tergantung dari keadaan perekonomian keluarga siswa. Keluarga siswa dengan pemasukan rata-rata 2,5 juta yen per tahun mendapat bantuan sebesar 9.900 yen per bulan (118.800 per tahun), sedangkan keluarga siswa dengan pemasukan rata-rata 2,5-3,5 juta yen per tahun akan mendapat bantuan sebesar

4.950 yen per bulan (59.400 per tahun). Biaya pendidikan lain seperti biaya martikulasi, buku pelajaran, dan biaya perjalanan kelas tidak dibiayai. (MEXT, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2010)

Untuk memperoleh bantuan pendidikan dalam program ini, siswa harus memenuhi beberapa syarat yaitu : Siswa bersekolah di sekolah negeri maupun swasta (baik *full-time*, *part-time*, dan memiliki kesamaan kurikulum) atau beberapa sekolah yaitu *upper secondary education* pada sekolah *secondary* negeri atau swasta, *upper secondary departments* dari sekolah negeri atau swasta dengan kebutuhan pendidikan khusus, perguruan tinggi teknologi (siswa tahun pertama sampai ketiga saja), sekolah kejuruan, *specialized training colleges*, dan *miscellaneous schools*. Tentunya semua sekolah yang telah disebutkan di atas tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*. Selain itu, siswa harus mengisi formulir yang dikumpulkan melalui sekolah di mana harus ada bukti yang menunjukkan pendapatan orangtua. (MEXT, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 2010)

Sekolah Korea Utara Di Jepang

Sekolah Korea Utara dibangun di berbagai tempat di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sekolah ini dibangun oleh warga Korea yang ingin anak mereka untuk belajar bahasa, sejarah, dan budaya Korea sebagai persiapan untuk kembali ke Korea di masa depan. (Fukuoka n.d.) Sekolah Korea Utara saat ini tersebar di Jepang yang terpusat di area metropolitan yang merupakan tujuan dari imigran Korea pada masa kolonial. Terdapat 12 Sekolah Menengah Atas Korea Utara di Jepang dengan 1.800 siswa meliputi warga Korea Selatan dan Jepang, namun dua sekolah diantaranya telah ditutup. (Editorial 2013)

Sekolah Korea Utara mengajarkan semua pelajaran dengan bahasa Korea, kecuali dalam pelajaran Bahasa Jepang dan Inggris. Karena mereka tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat, mereka bebas membuat kurikulum termasuk buku pelajaran yang digunakan di sekolah. Buku pelajaran dibuat oleh perusahaan penerbitan yang terhubung dengan *Chongryon* dan tidak jarang juga dikirimkan

dari Korea Utara. Hal ini yang membuat sekolah Korea Utara dianggap menyebarkan propaganda anti Jepang di mana mereka mengajarkan sejarah dan politik dari persepektif Korea Utara. Terutama terkait mengenai kekejaman Jepang pada masa penjajahan.

Tuntutan Kelompok *Zaitoku-kai*

Sistem Politik merupakan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Sistem politik memiliki lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. (Almond 1997) Kebijakan atau output dalam skripsi ini adalah pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara berdasarkan program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* terutama program *High School Enrollment Support Fund* (karena *Free Tuition Fee at Public High Schools* diperuntukan bagi sekolah negeri Jepang). Kebijakan ini muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan bernama *Zaitokukai*.

The Zainichi Tokken wo Yurusanai Shimin no Kai (Kelompok masyarakat yang tidak menerima adanya hak istimewa bagi penduduk etnis Korea di Jepang), yang lebih populer disebut dengan *Zaitokukai* merupakan salah satu kelompok kepentingan yang cukup berperan di Jepang. Kelompok *Zaitokukai* merupakan kelompok ekstrimis sayap kanan anti-Korea yang menolak keberadaan etnis Korea di Jepang. *Zaitokukai* dibentuk oleh Makoto Sakurai pada 2 Desember tahun 2006. Makoto menggunakan media internet untuk mengorganisir anggota kelompoknya yang saat ini disinyalir berjumlah 15.000 orang. *Zaitokukai* diketahui sebagai organisasi yang berkumpul di jalan untuk menyerang etnis Korea secara verbal terutama di distrik Tokyo yaitu Shin-Okubo dan distrik Osaka yaitu Tsuruhashi yang keduanya dikenal sebagai *Korea Town*. *Zaitokukai*

memiliki tujuan untuk memusnahkan *special privileges* yang dimiliki oleh etnis Korea di Jepang, terutama status *special permanent residency*. (Agence 2013)

Sebagai suatu kelompok kepentingan, *Zaitokukai* harus dapat menjalankan fungsinya dengan mempengaruhi sktruktur pembuatan keputusan politik agar tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai dapat terealisasikan. *Zaitokukai* berperan dalam melakukan artikulasi kepentingan di dalam sistem politik di mana mereka menyampaikan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Untuk menjalankan fungsinya, *Zaitokukai* menggunakan saluran-saluran melalui:

a. Demonstrasi berupa *Hate Speech*.

Hingga saat ini, *Zaitokukai* telah banyak melakukan aksi *hate speech* yang menimbulkan kontroversi karena melakukan diskriminasi rasial terutama terhadap etnis Korea di Jepang. Aksi yang mereka lakukan terutama terhadap sekolah Korea Utara di Jepang adalah dengan meneriakkan slogan seperti “Throw Korean schools out of Japan” dan “This is a front for training North Korean spies”. (Agence 2013)

b. Hubungan pribadi dengan pejabat pemerintahan.

Pemerintahan Shinzo Abe beserta partainya yaitu Partai Demokratik Liberal, terutama setelah terpilihnya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya pada tahun 2012, memang dikenal dengan pandangan yang nasionalis. Sehingga dalam proses pembuatan keputusan, pandangan nasionalis ini tentu mempengaruhi hasil dari kebijakan yang ada. Belakangan, *National Public Safety Commission chairwoman* Eriko Yamatani disinyalir memiliki hubungan erat dengan kelompok ini. Dalam acara yang membicarakan tentang hubungan Jepang dengan Korea Selatan pada tahun 2009, Yamatani pernah berfoto bersama dengan anggota kelompok *Zaitokukai* yang bernama Shigeo Masuki. Keduanya telah saling mengenal selama 10 tahun karena memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang pendidikan. Selain itu, Yamatani bertanggung jawab dalam mengusut kasus penculikan oleh Korea Utara. (Shino 2014)

c. Saluran formal dan institusional lain yaitu media masa.

Zaitokukai juga menggunakan media internet dengan mengupload video aksi mereka dalam beberapa *website* sebagai media lain dalam melakukan *hate speech* dan menyebarkan ide rasisme serta informasi yang bias yang dimaksudkan untuk menciptakan kebencian dan diskriminasi rasial. (Committee 2013).

Melalui tiga saluran di atas, *Zaitokukai* menyampaikan tuntutan mereka yakni untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada sekolah Korea Utara di Jepang karena sekolah Korea Utara dianggap tidak memenuhi syarat dan diindikasikan mengajarkan nilai-nilai komunisme.

Setiap siswa berhak mendapat bantuan dana pendidikan berdasarkan kebijakan pada tahun 2010. Namun, karena bantuan ini tidak hanya diperuntukan bagi siswa di sekolah Jepang saja tetapi juga diperuntukan bagi sekolah asing atau internasional di Jepang, maka diperlukan adanya persyaratan bagi sekolah yang menginginkan untuk menerima bantuan tersebut. Untuk dapat menerima bantuan dana pendidikan berdasarkan program *Free Tuition Fee at Public High Schools and High School Enrollment Support Fund* terutama program *High School Enrollment Support Fund* (karena *Free Tuition Fee at Public High Schools* diperuntukan bagi sekolah negeri Jepang) harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, siswa harus bersekolah di sekolah negeri maupun swasta (baik *full-time*, *part-time*, dan memiliki kesamaan kurikulum) yaitu perguruan tinggi teknologi (siswa tahun pertama sampai ketiga), *specialized training colleges*, dan *miscellaneous schools* yang diakui oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* sebagai sekolah sederajat yang mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah menengah atas. Syarat yang kedua adalah siswa mengisi formulir yang dikumpulkan melalui sekolah di mana harus ada bukti yang menunjukkan pendapatan orangtua.

Untuk dapat memperoleh bantuan dana pendidikan, *Miscellaneous schools* harus diakui oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* sebagai sekolah sederajat yang mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah menengah atas. Sekolah juga harus menggunakan *textbooks* yang diterima atau diakui oleh *Ministry of Education, Culture, Sports,*

Science and Technology dan harus mengikuti pedoman mengajar yang telah disiapkan oleh *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* serta mengajarkan kepada siswa berdasarkan pedoman tersebut.

Namun pada kenyataannya, Sekolah Korea Utara diyakini oleh kelompok *Zaitokukai* mengajarkan nilai-nilai komunisme di mana materi yang diajarkan di sekolah Korea Utara disediakan oleh *Chongryon* dan sebagian disetujui oleh pemerintah Korea Utara. Sekolah Korea Utara mengajarkan semua pelajaran dengan bahasa Korea, kecuali dalam pelajaran Bahasa Jepang dan Inggris. Karena mereka tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah Jepang), mereka bebas membuat kurikulum termasuk buku pelajaran yang digunakan di sekolah. (Matsumoto n.d.) Buku pelajaran dibuat oleh perusahaan penerbitan yang terhubung dengan *Chongryon* dan tidak jarang juga dikirimkan dari Korea Utara. Hal ini yang membuat sekolah Korea Utara dianggap oleh kelompok *Zaitokukai* menyebarkan nilai komunisme dan propaganda anti Jepang.

Sekolah Korea Utara di Jepang juga diindikasikan oleh kelompok *Zaitokukai* digunakan sebagai media untuk mengajarkan anak-anak sebagai mata-mata di Jepang. Hal ini didukung dengan suasana sekolah yang sama seperti sekolah yang berada di Korea Utara pada umumnya. Foto Kim Il Sung sebagai *founding father* Korea Utara dan Kim Jong Il menghiasi setiap sudut sekolah, baik di ruangan kelas maupun di asrama. Siswa-siswi mengenakan seragam sekolah berupa seragam khas sekolah di Korea Utara yang dipandang buruk oleh masyarakat Jepang.

Jika kita kaitkan dengan syarat untuk memperoleh bantuan dana pendidikan, dapat dikatakan bahwa Sekolah Korea Utara di Jepang tidak memenuhi syarat karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk mendapat bantuan pendidikan siswa harus bersekolah di sekolah negeri maupun swasta yang diakui oleh *The Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* sebagai sekolah sederajat yang mengajarkan kurikulum yang sama dengan sekolah menengah atas. Dalam kurikulum tersebut, sekolah harus menggunakan *textbooks* dan pedoman mengajar yang diterima atau diakui oleh *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*.

Namun sekolah Korea Utara membuat kurikulum dan buku pedomannya sendiri yang dipasok oleh pemerintah Korea Utara. Pada tahun 2003, kementerian pendidikan Jepang memasukan sekolah Korea Utara dalam kategori sekolah yang sistem pembelajarannya tidak diakui secara ofisial sebagai koresponden terhadap kurikulum umum dari *native country*. Sekolah Korea Utara termasuk dalam kategori ini karena Jepang dan Korea Utara belum memiliki hubungan diplomatik hingga saat ini. (Beije 2009)

Berdasarkan kenyataan yang ada di sekolah Korea Utara tersebut, maka kelompok *Zaitokukai* sebagai kelompok ekstrimis sayap kanan yang notabennya menolak keberadaan etnis Korea di Jepang tidak tinggal diam. Dengan melakukan *Hate Speech* di depan sekolah Korea Utara dan juga menyebarkan video maupun slogan-slogan kebencian di internet, kelompok *Zaitokukai* menyalurkan tuntutan mereka agar didengarkan. Setelah tuntutan disampaikan, tuntutan tersebut digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan yang kemudian dipertimbangkan dan ditentukan pilihannya dari alternatif-alternatif yang tersedia. Proses ini berlangsung di parlemen dengan adanya diskusi-diskusi dari masing-masing fraksi atau parpol. Di dalam sistem politik Jepang, birokrasi dan Diet menjadi aktor inti dari proses pembuatan keputusan. Partai yang berkuasa mempengaruhi proses politik secara langsung karena anggota Partai Demokratik Liberal (sebagai partai yang berkuasa) dalam Diet menangani isu-isu penting yang dituntut oleh kelompok-kelompok penekan tertentu. Sehingga partai yang berkuasa bisa mempengaruhi pembuatan keputusan nasional pada tingkat paling bawah dalam setiap perundang-undangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintahan Shinzo Abe saat ini dikenal dengan pandangan yang nasionalis. Sehingga dalam proses pembuatan keputusan, pandangan nasionalis ini tentu mempengaruhi hasil dari kebijakan yang ada. Ditambah lagi dengan adanya hubungan pribadi antara anggota kelompok *Zaitokukai* dengan pejabat pemerintahan yang memungkinkan adanya lobi politik sehingga tuntutan tersebut dapat menghasilkan kebijakan atau keputusan yaitu tidak memberikan subsidi bagi sekolah Korea Utara.

Hard Power Pemerintah Jepang

Hard Power adalah kemampuan untuk menggunakan “*sticks*” dan “*carrots*” (menggunakan strategi ancaman atau paksaan) baik melalui kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi pihak lain. Pemerintah Jepang telah membuat kebijakan untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi siswa yang bersekolah di sekolah Korea Utara. Selain karena adanya tuntutan dari kelompok *Zaitokukai*, alasan lain pemerintah Jepang menolak untuk memberikan bantuan dana pendidikan adalah sebagai bentuk *hard power* pemerintah Jepang untuk mendesak penyelesaian kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an serta penghentian uji coba nuklir Korea Utara.

Isu penculikan merupakan isu yang mengancam keamanan nasional Jepang. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, banyak warga Jepang yang menghilang secara tidak wajar. Berbagai investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan testimoni dari agen Korea Utara yang telah ditangkap menunjukkan adanya kemungkinan yang kuat bahwa kasus penculikan ini dilakukan oleh Korea Utara. Sejak tahun 1991, pemerintah Jepang selalu menyampaikan kasus ini pada setiap kesempatan yang ada. Namun Korea Utara selalu mengelak keterlibatan mereka. Pada pertemuan antara Japan-DPRK (*The Democratic People’s Republic of Korea*) yang dilaksanakan September 2002, Kim Jong Il mengakui untuk pertama kalinya bahwa Korea Utara telah menculik warga Jepang. Korea Utara meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut serta mencegah untuk terjadinya hal yang serupa di masa depan. (MOFA 2010)

Pada bulan Oktober 2002, lima korban penculikan telah dipulangkan ke Jepang dari Korea Utara setelah 24 tahun lamanya. Sejauh ini pemerintah Jepang telah mengidentifikasi 17 warga Jepang meliputi lima orang yang telah dipulangkan. Warga Jepang yang telah dipulangkan tersebut adalah Yasushi Chimura, Fukie Chimura, Kaoru Hasuike, Yukiko Hasuike dan Hitomi Soga. Sementara itu, korban penculikan yang lain ada yang diakui tidak diculik oleh Korea Utara dan ada juga yang dinyatakan telah meninggal dunia namun belum ada bukti yang valid mengenai informasi tersebut.

Selain isu penculikan, isu senjata pemusnah masal atau nuklir menjadi ancaman yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Jepang. Korea Utara, negara yang berada sangat dekat dengan Jepang, hingga saat ini telah mengembangkan senjata nuklirnya. Untuk mencari solusi damai atas program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara, maka terbentuklah suatu perundingan yaitu *The Six Party Talks* diantara enam negara yaitu Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jepang. Perundingan ini terbentuk dikarenakan pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian Nonpoliferasi Nuklir (NPT). Sejak tahun 2003 hingga 2007 telah diadakan enam kali perundingan namun tidak menghasilkan jalan terang dikarenakan Korea Utara yang terus melakukan tes misil dan provokasi-provokasi. Korea Utara beberapa kali bersedia untuk meredam tindakannya namun hal ini berakhir pada jalan buntu ketika pada tahun 2009, Korea Utara memutuskan untuk keluar dari perundingan ini. Pada akhir tahun 2012 Korea Utara kembali meluncurkan misil jarak jauhnya dan beberapa uji coba nuklir lainnya pada awal tahun 2013 hingga saat ini.

Menanggapi kedua isu tersebut, pemerintah Jepang mengupayakan penyelesaian masalah menggunakan *hard power*. *Hard Power* adalah kemampuan untuk menggunakan “*sticks*” dan “*carrots*” baik melalui kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi pihak lain. Pada prinsipnya, dalam mempengaruhi pihak lain sebisa mungkin penggunaan *carrots* lebih diutamakan daripada penggunaan *sticks*. Jika iming-iming hadiah atau bujukan tidak berhasil membuat suatu pihak mengikuti keinginan dari pihak lain, maka barulah *sticks* bisa dipertimbangkan. Dalam kasus ini, pemerintah Jepang menggunakan “*Inducements and payments*” (*carrots*) atau bujukan untuk mempengaruhi pihak lain yaitu Korea Utara agar bersedia untuk segera menyelesaikan masalah penculikan maupun nuklir. Pemerintah Jepang memberikan iming-iming berupa pemberian subsidi pendidikan berdasarkan program *Fee Tuition Free At Public High School And High School Enrollment Support Fund* bagi Sekolah Korea Utara di Jepang jika pemerintah Korea Utara bersedia untuk menyelesaikan kasus penculikan dan nuklir.

Subsidi pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi sekolah Korea Utara. Sekolah Korea Utara di Jepang tentunya membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan segala aktifitas dan kegiatan di sekolah seperti biaya operasional berupa gaji guru dan pegawai sekolah, biaya bagi sarana prasarana penunjang belajar siswa dan lain-lain. Sumber dana atau biaya di sekolah Korea Utara sangat mengandalkan dari sumbangan yang telah dikurangi dengan pajak, pembayaran, dan bantuan regional (dari pemerintah prefektur/lokal). Selain itu pemerintah Korea Utara juga memberikan dana bantuan kepada sekolah Korea Utara. Namun, bantuan yang diperoleh dari pemerintah lokal dan dari pemerintah Korea Utara sangat kecil.

Minimnya sumber dana yang dimiliki sekolah Korea Utara di Jepang membuat biaya sekolah yang harus dibayar oleh orang tua siswa menjadi tinggi namun dengan fasilitas yang jauh dibawah jika dibandingkan dengan sekolah Jepang. Akibatnya beberapa orang tua sudah menyerah mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-Sekolah Korea Utara dan mengirim mereka ke sekolah-sekolah Jepang yang mendapat subsidi. Sekolah Jepang mendapatkan subsidi dari program *Fee Tuition Free At Public High School* yakni sekolah menengah atas negeri tidak mengharuskan untuk memungut biaya sekolah. Sehingga orang tua siswa tidak harus membayar biaya sekolah (kecuali biaya martikulasi, buku pelajaran, dan biaya perjalanan kelas). Padahal sekolah Korea Utara mengharuskan orang tua untuk membayar biaya sekolah sebesar 30.000 yen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pentingnya tunjangan biaya bagi Sekolah Korea Utara di Jepang membuat pemerintah Jepang memberikan iming-iming berupa pemberian subsidi pendidikan berdasarkan program *Fee Tuition Free At Public High School And High School Enrollment Support Fund* bagi Sekolah Korea Utara di Jepang jika pemerintah Korea Utara bersedia untuk menyelesaikan kasus penculikan dan nuklir.

Pada dasarnya baik *hard* ataupun *soft power* bertujuan untuk meraih apa yang menjadi kepentingan dari pihak yang menggunakannya. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan

sebagainya baik dalam pemerintahan maupun juga yang berlangsung dalam masyarakat luas yang meliputi individu maupun kelompok. *Hard power* yang dilakukan pemerintah Jepang bertujuan untuk meraih kepentingan nasional negaranya, baik dalam pemerintahan maupun juga yang berlangsung dalam masyarakat luas yang meliputi individu maupun kelompok. Dalam kasus ini, pemerintah Jepang memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui subsidi pendidikan. Masyarakat Jepang merasa resah jika akan terjadi lagi penculikan yang membuat mereka memandang etnis Korea di Jepang sebagai ancaman. Kepentingan nasional yang ingin dicapai adalah kepentingan keamanan. Keamanan dalam lingkup masyarakat yaitu yang merasa terancam akan penculikan dan mata-mata Korea Utara serta keamanan dalam lingkup negara yaitu nuklir Korea Utara yang mengancam karena posisi geografis Jepang yang dekat dengan Korea Utara.

Sampai saat ini Korea Utara belum memberikan keterangan yang memuaskan maupun bukti yang menunjukkan bahwa korban penculikan lainnya dalam keadaan aman dan akan segera dipulangkan ke Jepang. Pemerintah Jepang pun secara aktif menuntut Korea Utara untuk melakukan investigasi bersama dalam menangani masalah ini. Penculikan oleh Korea Utara merupakan isu yang penting karena terkait dengan kedaulatan Jepang dan kehidupan serta keamanan warga Jepang yang harus diselesaikan oleh pemerintah nasional Jepang. Selain itu, uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara meresahkan masyarakat internasional. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB menyebut uji coba nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran berat karena mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik yang mengancam perdamaian internasional. Jepang sebagai negara yang berada dekat dengan Korea Utara merasa terancam dengan adanya nuklir tersebut.

Kesimpulan

Pemerintah Jepang membuat program *Free Tuition at Public High Schools and the High School Enrollment Support Fund* yang diterapkan pada tanggal 1 April 2010. Sekolah asing yang berada di Jepang dapat mengajukan untuk

memperoleh bantuan dana pendidikan ini. Namun sekolah Korea Utara di Jepang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Tentunya sangat menarik jika kita melihat bahwa masalah politik antara Jepang dengan Korea Utara justru berimbas kepada sektor pendidikan. Alasannya adalah kelompok *Zaitokukai* yang merupakan kelompok anti-korea menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah untuk tidak memberikan bantuan dana pendidikan bagi sekolah Korea Utara di Jepang karena selain tidak memenuhi syarat, kelompok *Zaitokukai* mengindikasikan sekolah Korea Utara mengajarkan nilai-nilai komunisme dan menjadi tempat untuk mendidik mata-mata. *Zaitokukai* mengartikulasikan kepentingannya melalui *Hate Speech* yang kemudian mempengaruhi pembuat keputusan. Selain itu, alasan pemerintah Jepang tidak memberikan bantuan dana pendidikan kepada Sekolah Korea Utara adalah karena Korea Utara belum menyelesaikan masalah penculikan warga Jepang serta masih mengembangkan juga melakukan uji coba nuklir. Oleh karena itu, pemerintah Jepang merasa perlu untuk melakukan *carrot* dengan memberikan iming-iming subsidi pendidikan ke sekolah Korea Utara di Jepang.

Referensi

Agence France Presse. 2013. *Anti-Korean 'hate speech' in Japan ruled illegal*.

<http://www.capitalfm.co.ke/news/2013/10/anti-korean-hate-speech-in-japan-ruled-illegal/>.

Almond, Gabriel A. 1997. Studi Perbandingan Sistem Politik. dalam *Perbandingan Sistem Politik*, ed. Mohtar Mas'ood dan Colin McAndrews. Yogyakarta : Gajah Mada Press.

Beije, Adam. 2009. The Changing Contours Of Discrimination In Japan: The Treatment Of Applicants From North Korean-Affiliated Schools In Japan To National Universities. *New Zealand Journal of Asian Studies* 11.

Editorial. 2013. *Treat all students equally*.

<http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/03/01/editorials/treat-all-students-equally/#.VMhVDGiUfpD>.

- Fukuoka, Yasunori. n.d. *Koreans in Japan: Past and Present*.
<http://www.han.org/a/fukuoka96a.html>.
- Japan Committee of The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism. 2013. *Rise of Hate Speech in Japan*.
<http://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2013/12/rise-of-hate-speech-in-japan.html>.
- KIM, Wooki. 2014. *Discrimination against Korean school children in Japan today*.
<http://johnmenadue.com/blog/?p=2538>.
- Matsumoto, Mutsumi. n.d. *Education Policy for Korean minority in Japan*.
http://welfareasia.org/2ndconference/paper/Mutsumi%2520Matsumoto_Paper%282ndEASP%29.doc+%&cd=1&hl=id&ct=clnk.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 2010. *Feature2 Making Public High Schools Tuition-Free and High School Enrollment Subsidies*.
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1305888.htm.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 2010. *Free tuition fee at public high schools/High school enrollment support fund sistem*.
<http://www.mext.go.jp/english/elsec/1303524.htm>.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 2010. *Overview of Free tuition fee at public high schools*.
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.html.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 2010. *Overview of High school enrollment support fund system*.
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.html.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2010. *Abductions of Japanese Citizens by North Korea*.
https://www.google.co.id/search?q=mofa+abduction&oq=mofa+abduction&aqs=chrome..69i57.4124j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#.

Shino, Yuya. 2014. *Japan minister denies ties to hate speech group, government says.*
<http://www.reuters.com/article/2014/09/18/us-japan-politics-photos-idUSKBN0HD0KN20140918>.

Tanaka, Hiroshi. 2011. *Japan's Multicultural Co-existence Seen in the Exclusion of Korean Ethnic High Schools from the School Tuition – free program.* <http://www.sietar-kansai.com/en/20110711175942.html>.

Talmadge, Eric. 2013. *Japan turns up pressure on pro-Pyongyang schools.*
<http://bigstory.ap.org/article/japan-turns-pressure-pro-pyongyang-schools>.

United Nations Development Program. 2013. *Education Index.*
<http://hdr.undp.org/en/content/education-index>.